

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu Provinsi yang berada di Pulau Sulawesi adalah Sulawesi Barat, yang memiliki keanekaragaman geografis meliputi dataran tinggi, pegunungan, dan pesisir. Wilayah ini juga memiliki potensi alam yang melimpah, namun rentan terhadap berbagai bencana alam seperti tanah longsong, banjir, gempa bumi, dan badai tropis. Di Sulawesi Barat, sebagian besar penduduk mengandalkan sektor pertanian dan perikanan yang merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat Sulawesi Barat, sehingga ketahanan pangan di daerah Sulawesi Barat sangat bergantung pada produksi lokal. Namun, dengan karakteristik wilayah yang rawan bencana serta mengancam stabilitas produksi dan distribusi pangan, sehingga perlu adanya penguatan logistik untuk menghadapi potensi bencana.

Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah dengan skor Indeks Risiko Bencana tertinggi di Indonesia dengan Poin sebesar 160,08. Berdasarkan dengan hal tersebut maka Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan sebagai daerah yang rawan bencana. Berbagai ancaman bencana selalu membayangi masyarakat Sulawesi Barat termasuk dengan potensi gempa *Megathrust*, sehingga diterbitkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1334 Tahun 2024 Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometrologi Basah dan Ancaman Gempa *Megathrust* di Provinsi Sulawesi Barat Pada Tahun 2024.

Penguatan logistik sektor pangan sangat penting dalam mitigasi bencana dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana dalam situasi darurat. Logistik yang baik dapat mempercepat distribusi bantuan pangan, mengurangi risiko kelaparan, dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pasca-bencana. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena infrastruktur transportasi di Sulawesi Barat sering menghadapi berbagai kendala, seperti jembatan yang mudah rusak dan sistem penyimpanan pangan yang masih terbatas yang dapat memperlambat distribusi pangan, terutama saat terjadi bencana. Selain itu, dengan mobilisasi bantuan yang terkoordinasi dengan baik, maka akan meminimalkan dampak bencana serta mempercepat proses pemulihan pasca gempa.

Terdapat beberapa kendala dalam penguatan logistik sektor pangan di Sulawesi Barat, antara lain *Pertama*, kekurangan tenaga ahli dalam manajemen logistik, perencanaan bencana, serta distribusi pangan dapat menghambat efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana. *Kedua*, distribusi bantuan pangan biasanya mengandalkan organisasi sosial dan pemerintah pusat, yang menyebabkan ketahanan lokal menjadi lemah, terutama jika bantuan tersebut terlambat. *Ketiga*, rantai pasokan pangan di Sulawesi Barat sangat tergantung pada jalur transportasi darat dan laut, yang dapat terganggu oleh bencana. Mengatasi kendala ini memerlukan investasi di bidang infrastruktur dan teknologi. *Keempat*, perkembangan teknologi dapat memperkuat sektor logistik dengan meningkatkan efisiensi distribusi pangan.

Adapun data jumlah cadangan beras di Provinsi Sulawesi Barat:

Tabel 1.1 Data Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten Tahun 2019 S/D 2023

NO	PROVINSI / KAB	2019	2020	2021	2022	2023	PENYALURAN	ADDENDUM VOLUME BERKURANG	STOK AKHIR
1	SULAWESI BARAT	5.000	9.000	6.600	95.950	8.000	19.750	5.249,8	99.550
2	MAJENE	-	-	928	1.100	930	2.028	-	930
3	MAMASA	-	-	-	-	500	-	-	500
4	MAMUJU	-	1.565	4.894	25.797	-	3.985	147	28.124
5	MAMUJU TENGAH	-	-	-	-	7.480	0	0	7.480
6	PASANGKA YU	-	-	-	4.000	1.000	2000	-	2.000
7	POLEWALI MANDAR	-	-	-	-	5.000	-	-	5.000

Sumber : Data Dinas Ketahanan pangan Sulawesi Barat

Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perhitungan Cadangan Pangan menetapkan target cadangan pangan sebesar 162,37 ton, menurut data di tabel table 1. Namun, stok pangan yang tersedia di Sulawesi Barat masih di bawah target tersebut.

Badan Pangan Nasional membagi urusan pangan menjadi empat tingkatan: nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Pemerintah Sulawesi Barat telah mengambil langkah-langkah untuk menangani pemenuhan cadangan pangan termasuk untuk kebencanaan dan hal-hal darurat yang lain, Berdasarkan Pasal 2, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2019 Mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk membantu pemerintah provinsi mengantisipasi dan menangani dampak dari krisis pangan, kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, gagal panen, bencana alam, dan keadaan darurat. Menurut Pasal 13, Ayat (1), penyaluran cadangan pangan dilakukan untuk menangani (a) rawan pangan, (b) krisis pangan, (c) gejolak harga pangan, (d) bencana alam, (e) bencana sosial, dan/atau (f) keadaan darurat.

Bencana gempa bumi yang pada Tanggal 15 Januari 2021 silam, dan Lebih dari 100 orang tewas dan lebih dari 7.800 rumah rusak dan sekitar 37.000 orang mengungsi akibat gempa M 6,2 yang melanda Mamuju dan Majene, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, terjadi kerusakan infrastruktur yang menyebabkan banyak kerugian material, mempengaruhi kegiatan ekonomi dan memperlambat pengiriman bantuan pangan kepada masyarakat terdampak. Fenomena ini dapat merusak jalan dan jalur distribusi, memutuskan konektivitas antarwilayah, serta mengganggu akses masyarakat terhadap sumber pangan dan bantuan logistik.

Permasalahan lain ditimbulkan dari faktor anggaran pengadaan serta pengelolaan pangan di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 1.2 Pagu Anggaran Pengadaan cadangan Pangan 2021-2024

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi	
			Keuangan	Fisik
2021	100.000.000	92.200.650	92.29 %	100%
2022	1.253.775.000	1.097.477.450	87.53%	100%
2023	116.348.910	106.277.250	91.34%	100%
2024	80.000.000	63.480.827	79.35%	100%

Sumber: LKIP Dinas ketahanan Pangan Provisni Sulawesi Barat 2021-2024

Pada Tabel diatas menjelaskan bahwa Pada Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 anggaran untuk pemenuhan cadangan pangan yang melekat pada dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan dari RP. 1.253.775.000 ditahun 2022 turun menjadi Rp. 116.348.910 ditahun 2023 dan hanya Rp. 80.000.000 ditahun 2024. Data tersebut menunjukkan kelemahan dari sisi anggaran pemenuhan cadangan pangan daerah Sulawesi Barat.

Penguatan Logistik di sektor pangan sangat berpengaruh terhadap mitigasi bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Kami mengambil tema ini sabagaimedia mitigasi bencana dikarenakan keterkaitan yang sangat kuan Antara ketersediaan pangan dan kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Mengapa demikian, karena pengalaman di kejadian bencana sebelumnya yang selalu menjadi kendala yaitu kurangnya pangan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Kebanyakan bantuan pangan yang kita andalkan masih dari daerah lain dan juga lembaga masyarakat seperti *non Governmental Organization*. Maka dari itu pemerintah harus mengambil langkah bagaimana agar permasalahan pangan ini menjadi urusan dasar dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

1.2 Pertanyaan Penelitian

Peningkatan logistik sektor pangan di Provinsi Sulawesi Barat akan memerlukan upaya-upaya penanganan khusus dari pemerintah yang menangani permasalahan tersebut, Sulawesi Barat memiliki potensi pertanian serta perkebunan yang cukup tinggi termasuk pertanian tanaman pangan. Oleh sebab itu diperlukan analisis untuk bagaimana pengelolaan hilirisasi pertanian pangan lokal menjadi penopang untuk pemenuhan cadangan pangan daerah provinsi Sulawesi Barat. Untuk itu, keterlibatan *stakeholder* pengampuh urusan pangan semestinya memaksimalkan produktivitas serta pemenuhan cadangan pangan daerah.

Maka dari itu peneliti juga akan menggali lebih jauh bagaimana dengan kondisi lapangan serta kendala apa yang terjadi saat ini. Sehingga peneliti dapat mengambil langkah-langkah apa serta strategi penanganan permasalahan dan isu-isu yang terjadi dilapangan. Berikut kami sajikan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini :

1. Bagaimana kondisi kelembagaan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap pendistribusian cadangan pangan daerah Provinsi Sulawesi Barat?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kendala dan permasalahan logistik cadangan pangan terhadap kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Barat?

3. Bagaimana strategi penguatan logistik sektor pangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Menganalisis kondisi kelembagaan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap pendistribusian cadangan pangan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Barat.
2. Menganalisis serta monitoring lapangan dan evaluasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kendala permasalahan logistik cadangan pangan di Sulawesi Barat.
3. Merumuskan strategi penguatan logistik sektor pangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi untuk pemerintah Sulawesi Barat, Akademisi, Masyarakat, dan Peneliti berikutnya:

1. Bagi Pemerintah Sulawesi Barat, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi serta strategi bagaimana cadangan pangan di Sulawesi Barat dapat terselenggara dengan baik terutama dalam mitigasi bencana;
2. Bagi Akademisi, sebagai referensi dan bahan studi yang diharapkan dapat berguna sebagai karya ilmiah bagi peserta didik;
3. Bagi masyarakat, penelitian diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat serta menjadi pedoman bagaimana masyarakat mampu melakukan penyelenggaraan cadangan pangan sendiri di rumah sebagai bentuk mitigasi bencana masing-masing individu;
4. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharap menjadi suatu bahan ilmiah serta bahan kajian-kajian terkait penyelenggaraan cadangan pangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan tentang lingkup wilayah penelitian. Penelitian ini akan mencakup beberapa ruang lingkup pada aspek pengelolaan cadangan logistik pangan dalam mitigasi bencana sebagai berikut:

1. Kawasan Penelitian: Penelitian ini berfokus di Wilayah Kabupaten Mamuju yang meliputi dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dan Badan urusan Logistik;
2. Objek penelitian: Objek utama penelitian yaitu tata pengelolaan cadangan pangan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Pendekatan Analisis: penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif dengan metode pengumpulan data serta menganalisis literasi terdahulu dan regulasi yang berlaku.

1.6 Landasan Teori

Terdapat dasar peraturan mengenai pemenuhan cadangan pangan, untuk penanganan pemenuhan cadangan pangan, terdapat beberapa regulasi pemerintah pusat yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menekankan pentingnya cadangan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan dan keadaan darurat akibat bencana.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 menetapkan jumlah minimal cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) yang harus dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan saat terjadi bencana atau keadaan darurat lainnya.
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018, Mengatur tentang pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola cadangan beras, termasuk prosedur pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran beras saat terjadi bencana atau kerawanan pangan.

Sedangkan untuk penelitian ini yang berfokus pada regulasi pemerintah daerah provinsi sulawesi barat terkait dengan pemenuhan cadangan pangan dalam penanganan, terdapat beberapa regulasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat yang relevan:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah:Peraturan ini menekankan pentingnya pengelolaan risiko bencana, termasuk penyediaan cadangan pangan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat yang paling penting dipenuhi selama masa tanggap darurat.
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Peraturan ini ditetapkan untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan di tingkat provinsi guna menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan, serta mengantisipasi keadaan darurat yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan daerah.

Selain itu berdasarkan jurnal-jurnal kebencanaan berikut ini rangkuman teori yang pada Jurnal A Pattern of Collaborative Logistics During Multiple Crises. Yang ditulis Bayu Fajar Nugroho, La Ode Nazaruddin, Ahmad Syamil, Haris Munandar Nurhasan, Erika Fatma, Muwasiq M. Noor, Ina Primiana Febri Mustika Soeharsono, Vita Sarasi, Maria Fekete-Farkas, Gyenge Balazs. 2024 menjelaskan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak krisis berganda terhadap kolaborasi logistik di negara berkembang dengan studi kasus di Indonesia, serta mengungkap pola kolaborasi di antara perusahaan logistik di negara tersebut. Pada Hasil penelitian membahas tentang bagaimana kolaborasi logistik dapat diterapkan untuk sektor pangan di Indonesia dalam konteks mitigasi dampak dari COVID-19 dan Perang Rusia-Ukraina, antara lain:

1. Kolaborasi antara Perusahaan Logistik: Peningkatan kerjasama antara perusahaan logistik diperlukan untuk menghadapi tantangan seperti keterlambatan pengiriman dan pembatasan perbatasan. Ini relevan dalam konteks distribusi barang pangan, di mana waktu pengiriman dan efisiensi sangat penting.

2. **Perencanaan Bersama:** Praktik seperti perencanaan bersama dan pengelolaan risiko kolaboratif dapat memperbaiki kinerja logistik dalam sektor pangan. Ketika perusahaan berbagi informasi dan sumber daya, mereka bisa lebih responsif terhadap fluktuasi permintaan dan penawaran.
3. **Pembangunan Jaringan Distribusi yang Fleksibel:** Kolaborasi horizontal dalam logistik berpotensi meningkatkan daya tawar dan kecepatan bisnis, yang sangat penting bagi kelancaran distribusi pangan. Ini mencakup penyusunan rute distribusi yang optimal, terutama di masa krisis.
4. **Manajemen Risiko:** Manajemen risiko yang lebih baik, seperti berbagi beban risiko antara pelaku logistik dan sektor pangan, dapat mengurangi dampak dari gangguan yang mungkin terjadi. Hal ini akan membantu sektor pangan tetap beroperasi meskipun ada tantangan besar seperti pandemi atau konflik internasional.

Menurut (Hörisch et al., 2014) Secara keseluruhan, kolaborasi yang lebih erat dan strategi yang terintegrasi di antara berbagai aktor dalam logistik sangat diperlukan untuk memperkuat daya tahan sektor pangan di Indonesia selama masa krisis.

Dalam Jurnal *Impacts of disaster and land-use change on food security and adaptation: Evidence from the delta community in Bangladesh*. Yang ditulis Afshana Parven, Indrajit Pal, Apichon Witayangkurn, Malay Pramanik, Masahiko Nagai, Hiroyuki Miyazaki, Chanakan Wuthisakkaroon 2022. Publisher: Elsevier, Dalam artikel ini, beberapa teori dan pendekatan yang digunakan mencakup:

1. **Teori Resiliensi Sosial-Ekologis:** Artikel ini menyoroti pentingnya pemahaman tentang bagaimana masyarakat dan ekosistem saling berinteraksi dan beradaptasi dalam konteks perubahan lingkungan yang disebabkan oleh bencana. Teori ini membantu menjelaskan cara individu dan komunitas merespons terhadap perubahan sosial dan ekologis yang dihadapi akibat bencana alam.
2. **Teori Penggunaan Lahan dan Perubahan Penggunaan Lahan:** Penelitian ini menggunakan analisis citra satelit untuk mengevaluasi perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Teori ini berkaitan dengan bagaimana faktor-faktor fisik dan sosial mempengaruhi cara lahan dimanfaatkan, serta dampak perubahan ini terhadap ketahanan pangan dan produksi pertanian di wilayah delta.
3. **Logika Perception of Risk:** Melalui penggunaan regresi logistik, penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap risiko bencana dan bagaimana persepsi ini memengaruhi keputusan adaptasi mereka. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi individu terhadap risiko sangat berpengaruh terhadap tindakan yang mereka ambil untuk mengurangi dampak bencana.
4. **Teori Kapasitas Adaptasi:** Artikel ini menekankan kapasitas masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan dan risiko yang dihadapi, berdasar pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Teori ini mendasari analisis tentang bagaimana sumber daya, baik fisik maupun sosial, memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi akibat bencana.
5. **Model Daya Tahan:** Penelitian ini juga mengacu pada ide-ide dasar mengenai daya tahan dalam konteks ketahanan pangan, yang menekankan pentingnya kekuatan sosial, ekonomi dan struktural untuk membantu komunitas dalam menghadapi bencana dan mengurangi ketidakpastian dalam produksi pangan.

Dengan berbagai teori ini, penelitian memberikan landasan yang kuat untuk memahami dinamika antara bencana, penggunaan lahan, dan ketahanan pangan di wilayah yang terpengaruh.

Menurut (Parven et al., 2022), Penguatan logistik sektor pangan dalam mitigasi bencana dibahas dalam konteks pentingnya kesiapan dan respon yang cepat dalam menghadapi dampak bencana terhadap ketahanan pangan masyarakat. Beberapa aspek yang dapat dipahami dari artikel mengenai penguatan ini adalah:

1. **Penyediaan Bantuan Darurat:** Penelitian menyarankan bahwa layanan publik, termasuk pencairan uang darurat dan bantuan medis, harus ditingkatkan. Ini menunjukkan bahwa logistik dalam distribusi pangan dan bantuan lainnya itu penting terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** Meningkatkan infrastruktur untuk dukungan pengiriman pangan dan distribusi yang efisien sangat penting. Infrastruktur yang baik memungkinkan akses cepat ke layanan kesehatan dan pangan, terutama setelah bencana terjadi, untuk membantu masyarakat dalam pemulihan dan keberlanjutan ketahanan pangan.
3. **Sistem Asuransi Pertanian:** Penerapan sistem asuransi pertanian dapat menjadi langkah penting dalam mitigasi bencana. Dengan adanya proteksi finansial, petani dapat lebih cepat memulihkan diri setelah bencana serta memperkuat ketahanan pangan secara keseluruhan.
4. **Rencana Adaptasi Lokal:** Penelitian menunjukkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengembangan rencana adaptasi untuk kebutuhan pangan. Hal ini bisa termasuk manajemen rantai pasokan pangan yang lebih baik dan sistem distribusi yang responsif terhadap keadaan darurat, memastikan pangan tersedia bahkan dalam situasi krisis.
5. **Keterlibatan Komunitas:** Melibatkan organisasi lokal, pemerintah, dan kelompok berbasis komunitas dalam proses mitigasi bencana dapat memperkuat kapasitas logistik dan respon terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan jaringan yang solid dalam menghadapi tantangan bencana.

Dengan langkah-langkah ini, penguatan logistik sektor pangan dapat membawa dampak positif dalam mitigasi bencana, sehingga membantu masyarakat untuk lebih siap dan tangguh ketika menghadapi situasi darurat.

Annisa Iskaputri, Amran Raazak, dan Muh. Alwy Arifin: Manajemen Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Hasanuddin Journal of Public Health, 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif. Contohnya adalah pengadaan logistik yang tidak tepat waktu dan pengangkutan yang tidak mempertimbangkan jenis angkutan sesuai dengan distribusi logistik

1. **Penguatan Logistik Sektor Pangan dalam Mitigasi Bencana:**
Menurut (Iskaputri et al., 2020), Penguatan logistik sektor pangan dalam mitigasi bencana adalah suatu pendekatan strategis yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan distribusi yang efisien dari kebutuhan pangan

selama situasi darurat. Beberapa langkah penting dalam penguatan logistik sektor pangan dalam konteks ini meliputi:

- a. Perencanaan dan Pengadaan: Penting untuk memiliki rencana yang jelas mengenai kebutuhan pangan selama bencana, termasuk jenis dan jumlah pangan yang dibutuhkan. Hal ini juga melibatkan pengadaan yang tepat waktu dan tepat jumlah, serta penetapan sumber pemasokan yang andal.
- b. Penyimpanan yang Efisien: Infrastruktur penyimpanan yang memadai dan tepat sangat penting untuk menjaga kualitas pangan. Logistik harus menyertainya dengan sistem untuk memastikan penyimpanan yang benar agar pangan tidak rusak.
- c. Distribusi yang Tepat: Proses distribusi logistik pangan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau daerah yang terdampak bencana dengan tepat waktu. Ini termasuk pemilihan jenis angkutan yang sesuai serta pertimbangan terhadap kondisi infrastruktur lokal.
- d. Keterlibatan Komunitas: Melibatkan komunitas lokal dalam proses logistik sangat penting untuk memahami kebutuhan spesifik dan saluran distribusi yang paling efektif. Hal ini akan meningkatkan respons dan adaptasi lokal selama bencana.
- e. Sistem Informasi dan Pemantauan: Penggunaan teknologi informasi untuk memantau kebutuhan dan ketersediaan pangan sangat penting dalam mengatur distribusi. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan efektif selama bencana.
- f. Kolaborasi Antar Lembaga: Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta sangat penting agar logistik pangan dapat dikelola dengan lebih baik. Kerjasama tersebut dapat mencakup dukungan dalam pengadaan, transportasi, dan distribusi pangan.

Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, penguatan logistik sektor pangan dalam mitigasi bencana dapat dilakukan dengan efektif, memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik.

Penggunaan Manajemen Logistik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Membantu Korban Banjir di Kabupaten Pati, oleh Trisna Rudy 2024 Sanskara Manajemen dan Bisnis (SMB). Studi ini menemukan bahwa dalam penanganan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati menggunakan manajemen logistik yang optimal. Berikut adalah beberapa temuan kunci dari penelitian tersebut:

1. Penerapan Manajemen Logistik: BPBD Kabupaten Pati secara efektif dan efisien mengelola setiap kegiatan penyaluran bantuan logistik terhadap korban bencana alam, dan memastikan bantuan dapat dikirim tepat waktu serta tepat sasaran.
2. Proses Distribusi yang Optimal: Penelitian mencatat bahwa meskipun ada tantangan, proses distribusi bantuan logistik penanggulangan bencana telah dilakukan dengan baik, termasuk perencanaan rute pengiriman dan pembentukan Pos Komando darurat.
3. Identifikasi Masalah: Beberapa permasalahan dalam distribusi juga diidentifikasi, seperti adanya barang yang sudah melewati masa kadaluwarsa, barang yang rusak, dan kurangnya koordinasi yang kadang menghambat distribusi. Namun,

BPBD telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut melalui pengecekan berkala dan pengaturan yang lebih baik.

4. Strategi Mitigasi: BPBD telah menggunakan peta rawan bencana sebagai alat bantu dalam mitigasi dan perencanaan, yang membantu dalam menentukan lokasi-lokasi yang perlu mendapatkan bantuan dengan efisien.

Menurut (Rudy, 2024), Beberapa poin terkait logistik dan pendistribusian makanan dalam konteks manajemen bencana dapat diinterpretasikan dari hasil penelitian yang telah diuraikan:

1. Perencanaan dan Distribusi yang Efisien: BPBD Kabupaten Pati melakukan perencanaan yang matang, termasuk menentukan rute distribusi bantuan logistik yang dapat mencakup pangan. Proses ini memastikan bantuan makanan dapat disalurkan tepat waktu serta tepat sasaran ke daerah yang terkena dampak bencana.
2. Pengadaan dan Penyimpanan: Pengelolaan logistik untuk pangan harus memastikan bahwa kualitas dan kuantitas bantuan pangan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan korban. Dalam penelitian ini, BPBD memiliki unit yang bertugas mengurus logistics, termasuk pengadaan dan penyimpanan barang, yang dapat mencakup kebutuhan pangan juga.
3. Mitigasi dengan Peta Rawan Bencana: Dengan menggunakan peta rawan bencana, BPBD dapat mengidentifikasi daerah yang berisiko tinggi dan merencanakan pengiriman pangan lebih awal, sehingga saat bencana terjadi, kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat dan efisien.
4. Koordinasi Antar Stakeholder: Penanganan bencana melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial dan organisasi non-pemerintah, yang juga dapat berkontribusi dalam penyediaan dan distribusi pangan selama situasi darurat. Hal ini menciptakan sinergi yang dapat memperkuat kemampuan distribusi pangan dalam mitigasi bencana

Johan Bhimo Sukoco, Anafil Windriya, Mashudi, Luluk Fauziah, Oki Dwi Wicaksono, dan Hadhrat Mirza Addeed Dawisha berbicara tentang peran BPBD Kota Semarang dalam meningkatkan logistik kemanusiaan. Tahun: 2023 Publisher: Jurnal Logistik Bisnis Penelitian ini berfokus pada peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam meningkatkan logistik kemanusiaan. Bagian Penanggulangan Bencana Kota Semarang (BPBD) mengungkap beberapa poin penting:

1. Peran Vital BPBD: Penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Semarang memiliki peran yang sangat penting dalam penguatan logistik kemanusiaan. BPBD bertanggung jawab atas manajemen dan distribusi logistik yang diperlukan dalam situasi bencana.
2. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM): Meskipun BPBD berperan penting, hasil penelitian mengungkapkan bahwa SDM yang ada di BPBD Kota Semarang masih belum memadai. Dari segi kuantitas, jumlah pegawai (76 orang) dianggap kurang dibandingkan dengan banyaknya bencana yang terjadi, sehingga mempengaruhi efektivitas respons dalam penanganan bencana.

3. Ketersediaan Sumber Daya Peralatan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Semarang memiliki sumber daya peralatan yang memadai untuk mendukung operasional dalam penanganan bencana. Ini termasuk berbagai jenis peralatan, kendaraan, dan fasilitas lain yang esensial untuk pengelolaan logistik kemanusiaan.
4. Pendidikan dan Pelatihan SDM: Penelitian menyoroti pentingnya pelatihan bagi SDM di bidang penanganan bencana dan logistik kemanusiaan. BPBD Kota Semarang berinisiatif untuk memberikan pelatihan guna meningkatkan kompetensi personel mereka, sehingga mereka dapat lebih siap dalam menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan bencana.
5. Digitalisasi dalam Pengelolaan: Penelitian juga menemukan bahwa penerapan sistem digital dalam pengelolaan logistik kemanusiaan sangat penting. Hal ini dianggap sebagai langkah untuk mengoptimalkan manajemen logistik, mulai dari pencatatan, penyimpanan, hingga pendistribusian.
6. Ketersediaan Fasilitas: BPBD Kota Semarang memiliki berbagai fasilitas yang diperlukan dalam menangani bencana. Misalnya, mereka memiliki koleksi peralatan seperti lampu penerangan (48 unit) yang mendukung operasional selama bencana.
7. Keseimbangan SDM dan Peralatan: Meskipun BPBD memiliki ketersediaan peralatan yang memadai, ada ketidakseimbangan antara SDM dan peralatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya peralatan bagus, kemampuan SDM yang rendah dapat menghambat efektivitas operasi logistik.

Menurut (Bhimo Sukoco et al., 2023), Dalam artikel mengenai logistik kemanusiaan dan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, penguatan logistik sektor pangan dalam mitigasi bencana mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa poin yang dapat diidentifikasi dari artikel tersebut mengenai penguatan logistik sektor pangan:

1. Peran BPBD dalam Pengelolaan Logistik: BPBD memiliki peran vital dalam menyusun strategi logistik, termasuk aspek penyediaan pangan dalam respons terhadap bencana. Ini mencakup persiapan terlebih dahulu untuk memastikan ketersediaan makanan bagi masyarakat yang terdampak.
2. Sumber Daya Manusia (SDM): Penguatan kapasitas SDM di BPBD sangat penting dalam pengelolaan dan distribusi logistik pangan. Walaupun artikel menyebutkan bahwa SDM di BPBD Kota Semarang masih belum memadai, upaya untuk meningkatkan kompetensi mereka di bidang logistik dan penanganan pangan adalah suatu langkah penting.
3. Sarana dan Prasarana: BPBD Kota Semarang diharapkan memiliki fasilitas dan peralatan yang mencukupi untuk membantu dalam pengelolaan logistik pangan, seperti kendaraan untuk distribusi dan tempat penyimpanan pangan. Memiliki peralatan yang memadai sangat penting untuk efisiensi pengiriman saat bencana terjadi.
4. Digitalisasi dan Modernisasi: Dalam artikel disebutkan pentingnya menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan logistik. Hal ini juga berlaku untuk sektor pangan, di mana penggunaan teknologi dapat membantu dalam pencatatan, penyimpanan, serta distribusi pangan dengan lebih efisien dan dapat dipercaya.

5. Pendekatan Kolaboratif: Artikel mengindikasikan perlunya kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan organisasi masyarakat dan sektor swasta, dalam menyusun sistem logistik pangan yang lebih baik. Hal ini dapat memberikan akses yang lebih luas dan meningkatkan respons terhadap kebutuhan pangan korban bencana.
6. Pemantauan dan Evaluasi: Evaluasi berkelanjutan pada sistem logistik, termasuk di sektor pangan, sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam pengiriman bantuan, serta untuk belajar dari pengalaman bencana sebelumnya.

Dari beberapa keterangan dari para ahli, maka penulis akan melakukan kajian terkait bagaimana strategi yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat dapat menjadi hal baru yang belum ada pada penelitian terdahulu, dengan menggunakan metode analisis data dengan mengaitkan Antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Strategi ini diharapkan mampu memberikan teori baru yang berlandaskan potensi yang ada di Sulawesi Barat unruk menyikapi permasalahan logistik yang ada di Sulawesi Barat. Dengan Analisis SWOT penulis akan melakukan pengkajian data yang digunakan dalam penentuan faktor sehingga akan membentuk strategi. Ini didasarkan pada logika dan dapat mengoptimalkan kekuatan (kekuatan) dan peluang (peluang) dengan meminimalkan kelemahan (kelemahan) dan ancaman (ancaman). Analisis SWOT melihat faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman)

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Distribusi Logistik Sektor Pangan dalam mitigasi bencana menjadi perhatian bagi beberapa peneliti. Penelitian (Iskaputri et al., 2020), menemukan bahwa manajemen logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan tidak dilaksanakan dengan baik karena distribusi logistik tidak tepat pada waktu dan pengangkutan juga tidak mempertimbangkan jenis angkutan yang sesuai terhadap logistik yang akan didistribusikan. Menurut Joharuddin et al. (2023), Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya mendapatkan logistik kesehatan untuk korban bencana alam. ABPD Kabupaten telah dievaluasi oleh DPRD dan memiliki perencanaan yang baik. Pergudangan logistik kesehatan telah tersedia, namun pergudangan tersebut kurang memadai dan perlu dilakukan renovasi dan perbaikan. Pendistribusian juga sudah baik, karena distribusi TNI/POLRI dan kerjasama dari berbagai sektor sangat dominan. Sumber Daya Manusia (SDM) di BPBD Kota Semarang masih dianggap rendah dan kurang memadai, yang ditunjukkan oleh tingkat pendidikan yang rendah (Bhimo Sukoco et al., 2023).

Namun, BPBD Kota Semarang telah mempunyai sumber daya dan peralatan yang cukup memadai, termasuk peralatan untuk kebencanaan, lampu penerangan, kendaraan, dan tenda. Untuk seterusnya, pengelolaan dan pemanfaatan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh BPBD Kota Semarang dapat dilakukan secara digital. Ini akan mencakup pengendalian logistik manusia dari pencatatan, penyimpanan, hingga pendistribusian. Menurut Satriawan et al. (2023), teori George R. Terry menyatakan bahwa pengelolaan logistik pasca bencana alam Kota Palu belum optimal. Teori ini mencakup perencanaan (perencanaan), perorganisasian (perorganisasian), di mana berbagai tugas dan tanggung jawab serta wewenang belum dilaksanakan secara efektif,

sehingga pengelolaan dianggap tumpang tindih, dan gerakan (penggerakan) dianggap belum optimal karena banyak pihak pendistribusian bantuan yang tidak berpartisipasi (Satriawan et al.)

Berdasarkan berbagai temuan penelitian dari berbagai Daerah, namun perlu ditahu bahwa terdapat kendala tengah dihadapi berbagai daerah pada pendistribusian logistik sektor pangan dalam mitigasi bencana, dan berbagai penelitian di atas hanya mengeksplorasi pendistribusian sektor pangan, tanpa melihat apa yang menjadi penguatan logistik sektor pangan dalam mitigasi bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan logistik sektor pangan dalam mitigasi bencana alam, serta kendala yang dihadapi dalam pendistribusian logistik sektor pangan dan solusi yang ditawarkan dari kendala-kendala yang dihadapi.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. berdasarkan analisis data secara deskriptif dari beberapa sumber literatur yang dikumpulkan. Pada pendekatan kualitatif ini, penelitian menggambarkan bagaimana kelembagaan yang dapat mengelola cadangan pangan terhadap kebencanaan di Provinsi Sulawesi Barat secara efektif, efisien, dan terintegrasi.

Penelitian kualitatif mengeksplorasi makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok untuk memahami fenomena sosial atau masalah tertentu. Berikut adalah beberapa elemen penting dari metodologi penelitian kualitatif. Dalam bukunya yang berjudul "Design Penelitian" dari tahun 2013, Menurut Jhon W. Creswell, metode penelitian kualitatif dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan yang dihadapi oleh sejumlah individu atau sekelompok orang. Dalam proses penelitian kualitatif, hal-hal penting dilakukan, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data khusus dari peserta, menganalisis data secara induktif mulai dari masalah umum hingga masalah khusus, dan memahami makna data.

Ciri-ciri penelitian Kualitatif adalah:

- a. **Bersifat deskriptif dan eksploratif** dengan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena yang terjadi.
- b. **Data berbentuk narasi** dengan Menggunakan wawancara, observasi, atau dokumen sebagai sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti.
- c. **Pendekatan subjektif dan interpretatif** yang diharapkan Peneliti berperan sebagai instrumen penting dalam mengumpulkan serta analisis data penelitian.
- d. **Analisis dilakukan secara induktif** berawal dari data di lapangan untuk membangun teori serta konsep.

Melalui jenis penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan sebuah kerangka kelembagaan yang tidak hanya mampu mengatasi permasalahan eksisting dalam pelaksanaan cadangan pangan, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

2.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan awal bulan Januari tahun 2025 sampai pada bulan April tahun 2025 Lokasi penelitian merupakan objek penelitian yang dimana kegiatan penelitian tersebut yang akan dilakukan. Lokasi penelitian yang akan kami tempati yaitu di Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk mengumpulkan kebutuhan data, kemudian melaksanakan tinjauan kelapangan tepatnya di Badan Urusan Logistik Kabupaten Mamuju dan Badan Urusan Logistik Kabupaten Polewali Mandar untuk meninjau langsung cadangan pangan yang tersedia.

2.2.2 Lokasi Penelitian

Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan letak astronomis terletak pada posisi $0^{\circ}12' - 03^{\circ}38'$ Lintang Selatan dan $118^{\circ}43' 15'' - 119^{\circ} 54' 3''$ Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Barat yang beribu kota di M. Secara astronomis, Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi $0^{\circ}12' - 03^{\circ}38'$ Lintang Selatan dan $118^{\circ}43' 15'' - 119^{\circ} 54' 3''$ Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Barat yang beribu kota di Mamuju ini memiliki luas wilayah 15.760,56 km². Berdasarkan posisi geografisnya, batas administratif Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan langsung provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan : Berbatasan langsung provinsi Sulawesi Selatan
- Sebelah Barat : Berbatasan langsung laut selat Makassar
- Sebelah Timur : Berbatasan langsung Provinsi Sulawesi Selatan

Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten, 69 Kabupaten dan 650 desa/kelurahan dengan total luas wilayah provinsi sebesar 15.760 m². Pada penelitian ini berfokus pada 2 kabupaten yang memiliki gudang badan urusan logistic (BULOG) yaitu di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar, berikut ini batas administratif Kabupaten Mamuju:

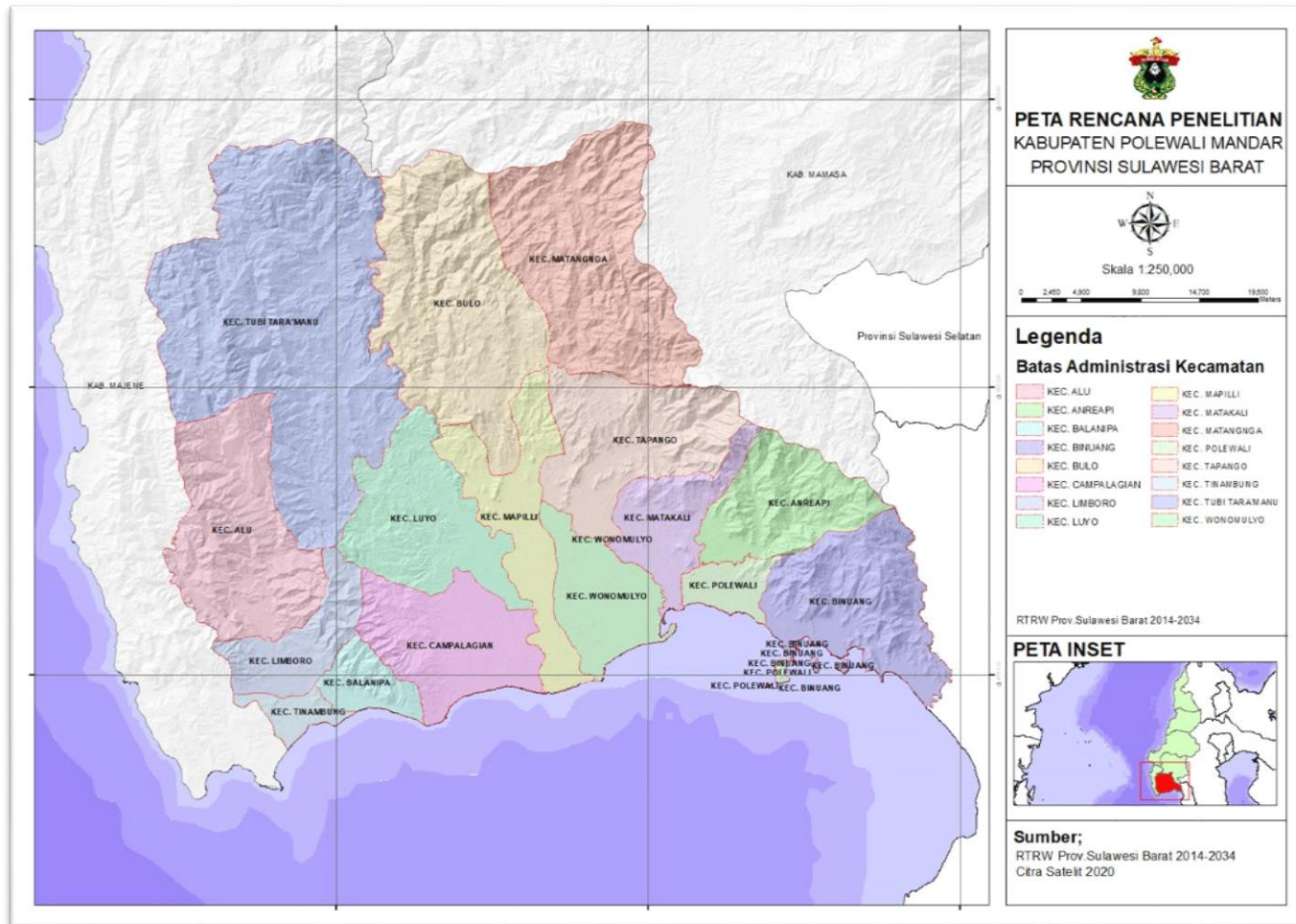
- Sebelah Utara : Berbatasan Kabupaten Mamuju Tengah
- Sebelah Selatan : Berbatasan Kabupaten Majene, Mamasa
- Sebelah Barat : Berbatasan selat Makassar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan

Sedangkan untuk batas administratif Kabupaten Polewali sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Kabupaten Mamasa dan kabupaten Majene
- Sebelah Selatan : Berbatasan selat Makassar
- Sebelah Barat : Berbatasan Kabupaten Majene
- Sebelah Timur : Berbatasan Kabupaten Mamasa dan Pinrang

Adapun luas dari Kabupaten Mamuju sebesar 3.973,07 km² dengan persentase terhadap luas provinsi sebesar 25,21% yang merupakan Ibukota Provinsi yang paling luas, sedangkan luas Kabupaten Polewali Mandar sebesar 1.775,65 km² dengan luas persentase pada provinsi sebesar 11,27 yang merupakan kabupaten terkecil kedua setelah Kabupaten Majene.

Gambar 2.1 Peta Lokasi Kabupaten Mamuju



Gambar 2.2 Peta Lokasi Kabupaten Polewali Mandar

2.3 Jenis Data

Pada penelitian ini, adapun jenis data yang akan digunakan mencakup data kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi kelembagaan terhadap pelaksanaan cadangan pangan di Sulawesi Barat, serta untuk melihat bagaimana pelaksanaan tersebut dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Wawancara mendalam dengan stake holder terkait dalam hal ini dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dan Badan urusan Logistik Sulawesi Barat akan menjadi sumber utama dalam memperoleh data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu data variabel dan data sekunder:

1. **Variabel:** informasi yang terkumpul langsung dari responden dengan metode wawancara, survei, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pihak yang terlibat pelaksanaan cadangan pangan seperti pejabat pemerintah di Dinas ketahanan pangan provinsi Sulawesi Barat dan Badan Urusan Logistik. Survei akan dilakukan kepada masyarakat yang terdampak musibah bencana dan keadaan darurat di beberapa daerah di Sulawesi Barat. Sementara itu, observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung bagaimana operasionalisasi pelaksanaan distribusi di lapangan.
2. **Data Sekunder:** informasi yang akan diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang sesuai dengan pelaksanaan cadangan pangan di Provinsi Sulawesi Barat. Sumber data sekunder meliputi laporan resmi dari pemerintah, seperti laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Barat, laporan tahunan badan Urusan Logistik, serta dokumen. Selain itu, kajian akademis, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas penguatan logistic pangan juga akan digunakan sebagai referensi untuk memahami konsep dan teori terkait. Data sekunder ini berperan penting dalam menyediakan landasan teoretis dan konteks historis mengenai isu penguatan logistic pangan daerah Sulawesi Barat

Dengan kombinasi antara data primer dan sekunder, penelitian ini akan memperoleh informasi yang lebih komprehensif untuk menganalisis tipe kelembagaan pengelola pengelolaan pelaksanaan cadangan logistic pangan di Sulawesi Barat. Pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan pelaksanaan cadangan pangan terhadap kebencanaan terlaksana secara, efektif, dan efisien di Sulawesi Barat.

2.4 Penentuan Variabel dan Data Sekunder

2.4.1 Penentuan Variabel

Data primer diperoleh dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan diberikan kepada pengumpul data yaitu observasi, pembagian kuesioner, Penentuan variabel dilakukan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dengan melakukan wawancara serta melihat data ketersediaan cadangan pangan yang diatur dalam regulasi yang berlaku. Adapun Variabel yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Kelembagaan pelaksana pengelolaan serta distribusi cadangan pangan daerah terhadap kebencanaan;

2. Ketersediaan Data cadangan pangan serta bentuk penganggaran serta Kendala dan permasalahan daerah provinsi Sulawesi Barat;
3. Bentuk strategi dari pemerintah dalam penguatan cadangan pangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

2.4.2 Pengambilan Data Sekunder

Pengambilan data sekunder akan dilakukan pada saat peneliti melakukan tinjauan lapangan yang akan dilakukan pada gudang badan urusan logistik yang terdapat di dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yaitu kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Adapun data yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Jenis cadangan pangan yang tersedia;
2. Ketersediaan cadangan pangan terhadap kebencanaan;
3. Besaran alokasi anggaran terhadap cadangan pangan;
4. Pendistribusian cadangan pangan terhadap kebencanaan;
5. Kendala serta permasalahan.

Tabel 2.1 Tabel Pemetaan Tujuan Penelitian dan Komponen Data

No.	Tujuan	Variabel	Indikator	Data	Metode Pengambilan Data	Teknik Analisis
1	Melakukan analisis dan kelembagaan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta pendistribusian cadangan pangan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi	Kelembagaan serta distribusi cadangan pangan	• Struktur Organisasi/Kelembagaan • Kondisi Ketersediaan fasilitas • Kondisi Operasional Alur Pendistribusian	- Dokumen Kebijakan Kelembagaan - Data Sekunder	- Studi Dokumen - Observasi Lapangan	- Analisis deskriptif kualitatif
2	Melakukan analisis serta monitoring lapangan dan evaluasi mengenai Faktor-faktor penyebab kendala permasalahan logistik cadangan pangan di Sulawesi Barat;	Alokasi penganggaran serta kendala dan permasalahan	• Kejadian Bencana Alam • Distribusi Pangan • Alokasi Anggaran	- Data Sekunder	- Studi Literatur - Tinjauan Observatif	- Analisis serta wawancara - Analisis hasil tinjauan
3	Melakukan konstruksi strategi penguatan cadangan pangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat	Strategi pemerintah dalam penguatan cadangan pangan terhadap bencana	• Sumber Daya Yang Dimiliki • Persepsi Publik	- Data Dari Studi Kasus Kelembagaan Di Kota Lain - Besaran Alokasi Anggaran	- Studi Kasus Komparatif - Studi Dokumen	- Studi Komparatif - Analisis SWOT

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu bagian dari penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan menjelaskan permasalahan yang diteliti, berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini:

2.5.1 Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif menurut Sugiyono merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang akan dilakukan dengan cara peneliti ikut berpartisipasi dalam kelompok yang diteliti. Observasi Partisipatif dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap pengelolaan logistik pangan untuk kebencanaan, maka dari itu peneliti akan:

1. Mengamati kesediaan logistik jenis pangan yang tersedia pada badan urusan logistic (BULOG) Provinsi Sulawesi Barat;
2. Melihat sarana dan prasarana penunjang yang digunakan oleh pengelola

2.5.2 Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan melihat regulasi yang berlaku dan menjadi pedoman dalam pencadangan pangan terhadap kebencanaan di Sulawesi Barat:

1. Kebijakan dari pemerintah pusat;
2. Kebijakan dari pemerintah daerah provinsi

Studi dokumen diharapkan akan menambah konteks pendukung yang bertujuan

- a. Proses akuisi data
- b. Pengumpulan data kebutuhan awal
- c. Pengolahan data

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik metode analisis yang spesifik sesuai dengan karakteristik data dan variabel yang ditentukan. Berikut adalah metode analisis yang akan digunakan:

2.6.1 Tujuan Penelitian Pertama

Pada pertanyaan penelitian satu yaitu bagaimana kondisi kelembagaan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta pendistribusian cadangan pangan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi maka menggunakan analisis dengan metode deskriptif yang memungkinkan penggambaran kondisi kelembagaan pengelolaan pelaksanaan cadangan pangan, termasuk mengidentifikasi struktur organisasi, fungsi kelembagaan, serta pola koordinasi antar-lembaga. Analisis ini juga akan mencakup pengkajian terhadap kendala yang ada, seperti fragmentasi kewenangan, peran kelembagaan yang tumpang tindih, dan birokrasi yang memperlambat proses integrasi.

2.6.2 Tujuan Penelitian Kedua

Pada pertanyaan penelitian kedua yaitu bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kendala dan permasalahan logistik cadangan pangan terhadap kejadian bencana di Provinsi Sulawesi Barat menggunakan pengumpulan data yang akan diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, dokumentasi kelembagaan, serta kajian literatur yang relevan.

2.6.3 Tujuan Penelitian Ketiga

Pada tujuan penelitian ketiga yaitu bagaimana strategi penguatan cadangan pangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat maka akan menggunakan metode analisis komparatif akan digunakan. Metode ini akan membandingkan berbagai penyebab kendala dan permasalahan. Selain itu, pendekatan metode SWOT Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) akan diidentifikasi. Setelah data dikumpulkan, analisis tematik akan dilakukan untuk menemukan tema-tema utama dan artinya. Dalam proses ini, interpretasi hasil wawancara, diskusi, observasi, dan meninjau dokumen diperlukan. Untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dan akurat, hasil analisis akan dibandingkan dan diverifikasi 1

Analisis SWOT merupakan metode analisis yang digunakan dalam penentuan faktor sehingga akan membentuk strategi. Ini didasarkan pada logika dan dapat mengoptimalkan kekuatan (kekuatan) dan peluang (peluang) dengan meminimalkan kelemahan (kelemahan) dan ancaman (ancaman). Analisis SWOT melihat faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman).

Rencana strategis dibuat dalam tiga tahap: pengumpulan data, analisis, hingga pengambilan keputusan. Pada dasarnya, tahap pengumpulan data ini mencakup pengklasifikasian dan pra-analisis serta pengumpulan data. Pada tahap ini, data dibagi menjadi dua kategori: data eksternal dan data internal. Model yang dapat digunakan di sini terdiri dari tiga model matriks (Kotler 1997 dalam Manajemen Pemasaran), yaitu:

- a. Matrik Faktor Strategi Internal/Internal Factors Analysis Summary (IFAS)
- b. Matrik Faktor Strategi Eksternal/Eksternal Factor AnalysisSummary (EFAS)
- c. Matrik posisi hasil dari analisis di tabel matrik faktor internal dan eksternal yang dipetakan pada matrik posisi dengan cara sebagai berikut:

Matriks SWOT menjelaskan peluang dan ancaman dari sumber luar yang dapat diperbaiki berdasarkan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Metode matriks SWOT digunakan untuk menggabungkan empat jenis strategi, yaitu SO (Strength Opportunities) yang menjadi **faktor pendukung**, WO (Weakness Opportunities) yang menjadi **faktor penghambat**, ST (Strength Threats) dan WT (Weakness Threats). Dalam penelitian ini menggunakan Analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Berikut ini adalah bentuk matriks yang dikembangkan oleh Kearns:

Tabel 2.2. Bentuk Matriks SWOT

IFAS EFAS	Strengths (Tentukan faktor yang termasuk kekuatan internal)	Weaknesses (Tentukan faktor yang termasuk kelemahan internal)
	Strategi SO (Faktor Pendukung) melahirkan strategi yang mengaitkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO (Faktor Penghambat) melahirkan strategi yang meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Opportunities (Tentukan faktor yang termasuk peluang internal)		
Threats (Tentukan faktor yang termasuk ancaman internal)	Strategi ST melahirkan strategi yang mengaitkan kekuatan untuk mengetahui ancaman	Strategi WT Melahirkan strateigi yang meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Analisis SWOT Kearns 1992

IFAS memberikan rumus yang dimana beberapa faktor strategis internal suatu objek dalam kerangka Kekuatan dan Kelemahan, sedangkan EFAS merumuskan faktor-faktor strategis eksternal suatu perusahaan dalam kerangka Peluang dan Ancaman (Freddy Rangkuti, 2001).